

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KAWASAN KUMUH MOJO

Jurnal Pengembangan Kota (2025)

Volume 13 No. 1 (11–23)

Tersedia online di:

<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

DOI:10.14710/jpk.13.1.11-23

Bambang S. Pujantiyo*, Murtanti Jani Rahayu*Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,
Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret,
Indonesia*

Abstrak. Program tata ulang fisik di kawasan kumuh secara masif telah dilakukan oleh Pemerintah, tetapi belum banyak menyertakan program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Padahal peningkatan ekonomi masyarakat ini penting untuk dapat menjamin keberhasilan tata ulang fisik. Sementara itu, tanpa inisiatif kegiatan tersebut, masyarakat melakukan pemberdayaan secara mandiri dengan prinsip mempertahankan pendapatan. Hal ini penting untuk diidentifikasi, dan akan menjadikan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan penerapan program selanjutnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya terkait pendapatan masyarakat dalam kerangka kolaborasi *triple helix* di kawasan kumuh Mojo di kota Surakarta. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat setempat. Sebagai hasilnya, dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat secara mandiri, pengaruh modal sosial khususnya peran beberapa intermediasor independen yang dikelola oleh masyarakat, sangat dominan mempengaruhi keberlanjutan dalam tingkat pendapatan masyarakat.

Kata Kunci : Pemberdayaan Ekonomi; Masyarakat; Kawasan Kumuh; Modal Sosial; Intermediasor

[Title: THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL IN COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT IN MOJO SLUM AREA]. *The physical rearrangement program in slums has been carried out massively by the Government, but it has not included many programs for community economic empowerment activities. In fact, improving the community's economy is important to be able to ensure the success of physical reorganization. Meanwhile, without the initiative of these activities, the community empowers independently with the principle of maintaining income. This independent empowerment is important to identify, and will be an input for the government in determining the policy for the implementation of the next program. This study aims to analyze the pattern of community economic empowerment, especially related to community income in the framework of triple helix collaboration in the Mojo slum area in the city of Surakarta. The methodology used is qualitative descriptive with data collection through document studies and interviews with stakeholders and local communities. As a result, in terms of independent economic empowerment of the community, the influence of social capital, especially the role of several independent intermediaries managed by the community, is very dominant in influencing the survival of the community in the income level of the community.*

Keywords: Economic Empowerment; Community; Slum Area; Social Capital; Intermediasor

Cara Mengutip: Pujantiyo, Bambang S., & Rahayu, Murtanti Jani. (2025). PERAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KAWASAN KUMUH MOJO. **Jurnal Pengembangan Kota**. Vol 13 (1): 11-23. DOI: 10.14710/jpk.13.1.11-23

1. PENDAHULUAN

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi

dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat ([Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman](#)). Di negara berkembang seperti di Indonesia, masih banyak terdapat

kawasan kumuh. Jumlah rumah tangga kumuh di Indonesia masih cukup besar, mencapai 13,86% (BPS, 2019), dan hal ini sudah mengkhawatirkan karena sudah mencapai luasan 59,000 hektar (Muta'ali & Nugroho, 2016).

Sampai dengan saat ini Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah telah berusaha maksimal dalam menata ulang beberapa kawasan kumuh tersebut dengan melakukan perbaikan fisik dan lingkungan secara bertahap (The World Bank, 2016). Akan tetapi belum banyak menyertakan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Menurut Arisandi, Muthalib, Gamsir, Saenong, and Balaka (2023), yang melakukan review tentang pemberdayaan ekonomi kawasan kumuh di Kota Kendari, menjelaskan bahwa program pemerintah tersebut sudah cukup baik, tetapi kemiskinan dalam lingkungan kumuh masih tetap ada dan bahkan cenderung meluas ke wilayah lainnya (Arisandi et al., 2023). Demikian pula Bagdja and Nohong (2023), yang meneliti tentang kawasan kumuh di Kota Tangerang yang cenderung meluas, disebabkan oleh daya saing masyarakat yang masih minim sehingga menyebabkan kemiskinan yang meluas.

Sementara itu, Zubaidah, Rusli, Djaja Saefullah, and Widianingsih (2023), menjelaskan bahwa intervensi kawasan kumuh, seharusnya mengadopsi pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Demikian pula Rigon (2022), yang melakukan penelitian tata ulang kawasan kumuh di Nairobi Kenya, menjelaskan bahwa interaksi sosial sangat penting untuk diakomodir. Di jelaskan oleh Andriana and Manaf (2017), bahwa kemiskinan sangat terkait hubungannya dengan kawasan kumuh, sehingga perbaikan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan ini sangat perlu untuk diperhatikan. Kemudian, Hindun, Soejoto, and Hariyati (2019), menjelaskan bahwa kemiskinan sangat erat hubungannya dengan pendapatan. Dikatakan oleh Fadli (2015), dalam penelitiannya pasca bencana tsunami di Aceh, bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, peran modal sosial sangat penting. Hal ini disebabkan kepercayaan antar masyarakat sangat besar,

sehingga dalam bekerja maupun berusaha, sangat mempengaruhi pendapatan masing-masing (Fadli, 2015). Demikian pula Wuysang (2014), dalam penelitiannya tentang peningkatan pendapatan masyarakat yang dipengaruhi oleh kuatnya kelompok tani sebagai aset modal sosial di suatu kecamatan di provinsi Sulawesi Utara. Kemudian menurut Wu, Liu, Xu, and Sun (2023), di China pada tahun 2011- 2015, nama keluarga besar juga menjadi aset dalam modal sosial, dan hal ini sangat mempengaruhi pengembangan usaha karena sangat erat terkait dengan akses modal dan pasar. Sementara itu, menurut Suryanggono (2013), modal sosial sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan dengan keberterapan hidup masyarakat, sangat dipengaruhi oleh modal sosial yaitu; hubungan/interaksi sosial, solidaritas sosial, kepercayaan, tradisi, dan nilai/norma sosial (Juniarsih, 2018).

Damayanti, Yanti, and Hapsari (2022), dalam penelitiannya di kawasan kumuh di kota Palembang, mengatakan bahwa modal sosial berupa gotong royong, norma, jaringan, kepercayaan, imbal balik, serta tindakan proaktif yang dimiliki masyarakat bisa membantu masyarakat dalam mengatasi kendala dalam kegiatan revitalisasi kawasan permukiman kumuh. Kemudian, Satrio and Sukmawati (2021), yang melakukan penelitian di kawasan kumuh di Salatiga, menyimpulkan bahwa ikatan sosial yang erat, dan nilai kegotongroyongan di masyarakat sangat berpengaruh bagi keberterapan masyarakat di permukiman kumuh.

Demikian pula Ardhiawan, Handayani, and Musyawaroh (2025), menambahkan bahwa pengembangan usaha rumah tangga di kawasan kumuh Mojo, sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonominya. Ditambahkan oleh Handoyo (2013),

ISSN 2337-7062 © 2025

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). – lihat halaman depan © 2025

*Email: bambangsp@staff.uns.ac.id

Submitted 01 September 2024, accepted 30 July 2025

dalam penelitiannya tentang kesejahteraan pedagang kaki lima, menyimpulkan bahwa modal sosial yaitu *trust* dan *networking* sangat berkontribusi dalam meningkatkan kebutuhan minimal dan menjamin kelangsungan hidup pedagang. Dalam kaitannya dengan kawasan kumuh, pengaruh modal sosial dan peningkatan pendapatan setelah dilakukan tata ulang fisik, sampai dengan saat ini belum banyak terdapat penelitian yang signifikan. Hal ini sangat urgen untuk diketahui, disebabkan penguatan modal sosial setidaknya akan menjadi pertimbangan untuk dapat di prioritaskan khususnya dalam program peningkatan pendapatan masyarakat agar dapat menopang program tata ulang fisik.

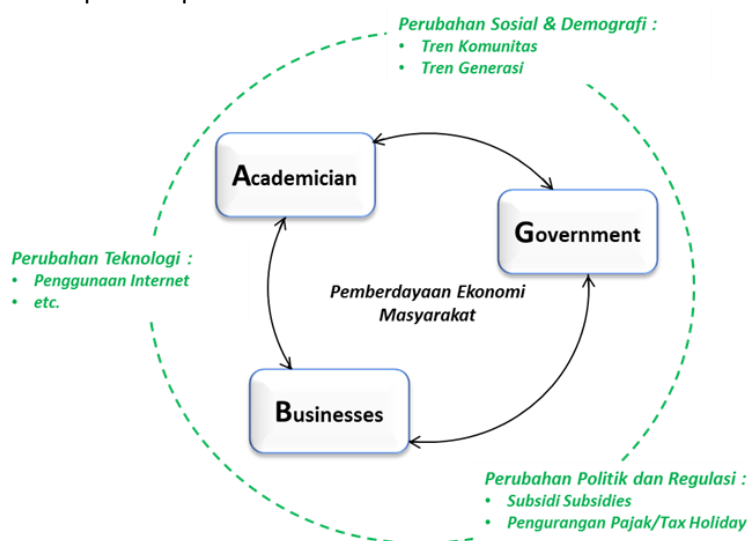
Kawasan kumuh Mojo di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, juga termasuk kawasan yang telah dilakukan tata ulang fisik dan lingkungan, dan berdasarkan pengamatan beberapa peneliti misalnya Fakhri, Astuti, and Andini (2023), dampaknya terhadap pendapatan masyarakat merupakan salah satu dampak signifikan. Akan tetapi belum ada evaluasi terhadap pendapatan masyarakat, terlebih lagi yang terkait dengan peran modal sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah, menganalisis peran modal sosial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan secara mandiri, khususnya terkait pendapatan masyarakat dalam kerangka kolaborasi *triple helix* di kawasan kumuh Mojo di kota Surakarta. Sehingga diharapkan dapat bermanfaat

bagi pemangku kepentingan dalam menerapkan program pemberdayaan tersebut. Adapun metodologi yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat setempat.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Tinjauan Teori

Pada umumnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam suatu kawasan, pelaksanaannya menggunakan pola kolaborasi *triple helix* ABG (Academician–Businesses–Government). Menurut Byers, Dorf, and Nelson (2001) dan Troot (2016), pola model *triple helix* ABG dan beberapa faktor yang mendukungnya, dapat di interpretasikan seperti terlihat pada Gambar 1. Dalam Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa adanya pengaruh eksternal seperti perubahan aspek sosial dan demografi, pemanfaatan teknologi, serta politik dan regulasi, dapat dipandang sebagai indikasi dapat dilaksanakannya penerapan *triple helix* ABG di suatu kawasan. Teori *Triple Helix* ABG adalah suatu pendekatan dalam menciptakan sinergi kerjasama dari tiga aktor pemangku kepentingan yaitu akademisi (A), pelaku bisnis (B), dan pemerintah (G) untuk membangun ekonomi berbasis pengetahuan di suatu kawasan (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Kholis, Nasirwan, Lubis, & Anggriyani, 2021).



Gambar 1. Pola Kolaborasi ABG dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sementara itu, Witjaksono (2014), sebagai praktisi dalam pengembangan usaha di Jawa Timur, menjelaskan bahwa modal sosial dapat dikatakan sebagai perekat dalam kolaborasi *triple helix*. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sosial masyarakat, sangat besar dalam pemberdayaan ekonomi, sehingga sangat perlu untuk diketahui lebih dahulu tentang peran sosial masyarakat di suatu kawasan dalam menghadapi kehidupan berkelanjutannya. Ditambahkan bahwa modal sosial adalah satu dari lima jenis modal yang diidentifikasi dalam konteks fokus kehidupan berkelanjutan, yang juga mencakup modal finansial, modal manusia, modal alam, dan modal fisik.

Sementara itu, di lingkungan kawasan kumuh, pada umumnya keterbatasan masyarakat sangat besar dalam aspek fisik, lingkungan, pendidikan, dan wawasan bisnis, sehingga masih sangat perlu untuk diidentifikasi terlebih dahulu tentang fokus kehidupan berkelanjutannya. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Soma, Sukhwani, and Shaw (2022), dan Fachlevi, Fauziyah, and Sunyigono (2022), menggunakan model *pentagonal assets* untuk dapat mengetahui fokus kehidupan berkelanjutan masyarakat di suatu kawasan. Demikian pula Setyaningrum and Nugroho (2022), yang juga menggunakan model *pentagonal assets* untuk mengetahui modal fisik, manusia dan alam dari komunitas pengolah ikan di Bantul Jawa Tengah.

Dikatakan juga oleh Muhammad, Islamy, and Sukoharsono (2014), bahwa dalam *pentagonal assets* tersebut, khususnya faktor penguatan modal sosial yaitu peran lembaga independen sebagai intermedator, juga sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan. Hal ini diperkuat dengan penelitian oleh Fadhila and Astutik (2023), bahwa peran lembaga independen sebagai aset dalam modal sosial, sangat penting untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

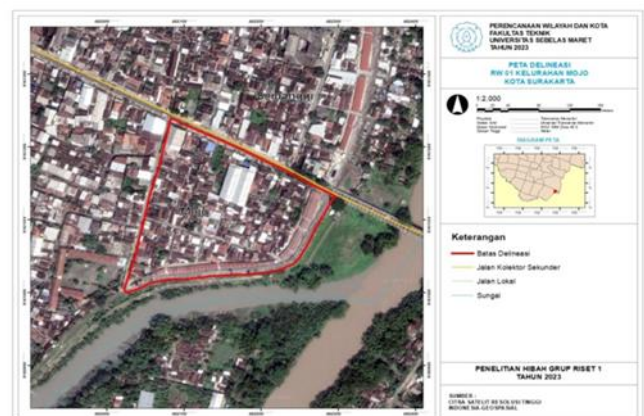
Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat akan tercapai bila dipahami

kehidupan berkelanjutannya dan ditambah dengan adanya penguatan dan dukungan dari pihak terkait.

Dalam penelitian ini, metodologi yang diterapkan, lebih dahulu menganalisis indeks fokus kehidupan berkelanjutan dengan menggunakan *pentagonal aset*, lalu menganalisis tingkat pendapatan masyarakat berdasarkan hasil wawancara, setelah itu memetakan peran modal sosial terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam kerangka kolaborasi *triple helix*.

2.2. Kawasan Mojo

Kelurahan Mojo merupakan salah satu kelurahan di Kota Surakarta yang terletak di kawasan dataran rendah. Wilayah ini merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Semanggi dengan luas sekitar $\pm 75,4$ ha (Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro). Kelurahan Mojo termasuk dalam wilayah prioritas penataan permukiman kumuh di Kota Surakarta. Sejak tahun 2018, Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan penataan skala kawasan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), yang kemudian dilanjutkan dengan proses penataan permukiman sejak tahun 2020. Delineasi wilayah penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Deliniasi Kawasan Mojo

Berdasarkan data BPS (2019), Kelurahan Mojo termasuk dalam wilayah Kecamatan Pasar Kliwon dengan jumlah penduduk sebanyak 13.917 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,12% per

tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 4.220 penduduk tidak bersekolah, 2.601 berpendidikan SD, 2.580 SLTP, 3.671 SLTA, dan 865 setingkat S1 (BPS, 2019). Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai buruh serabutan atau tidak bekerja, sementara hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai pengusaha. Dalam kegiatan perekonomian masyarakat, terdapat berbagai jenis usaha seperti kerajinan batik, pembuatan blangkon, jahit-menjahit, serta usaha kuliner seperti kopi, warung makan, jajanan anak, penjualan gas, dan sayuran. Selain itu, terdapat pula usaha jasa seperti bengkel las dan warung kelontong (Salinan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 640.05/48.3 Tahun 2021). Lebih lanjut, wilayah ini memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, antara lain seni tari dan pertunjukan tradisional, musik tradisional, wisata budaya, serta *budidaya vertical garden* dan *verti mina ponik*.

Pemilihan Kawasan Mojo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis dan empiris berikut:

- a. Kawasan permukiman padat dan kumuh : kawasan ini termasuk dalam prioritas penanganan permukiman kumuh karena kondisi infrastruktur dasar, keterbatasan ruang, serta rendahnya kualitas hunian (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020).
- b. Kerentanan sosial-ekonomi masyarakat : Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap. Kondisi ini sesuai dengan indikator kemiskinan perkotaan yang membutuhkan pendekatan pemberdayaan berbasis *pentagonal assets* untuk memahami keberlanjutan hidup masyarakat (Soma et al., 2022).
- c. Potensi penerapan model pemberdayaan : Dengan adanya intervensi dari pemerintah melalui program penataan kawasan kumuh (KOTAKU), serta dukungan LSM dan kelompok masyarakat lokal, kawasan ini memiliki potensi sebagai pilot project dalam implementasi pola *triple helix* dengan dukungan lembaga mediator. Hal ini relevan dengan gagasan Yunus (2017), bahwa peran kelompok lokal sangat penting sebagai penghubung antara masyarakat dan *stakeholder*.

- d. Relevansi dengan tujuan penelitian: Karakteristik kawasan yang kompleks, mulai dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya aset sosial-ekonomi, hingga kebutuhan pemberdayaan yang berkelanjutan menjadikannya sangat sesuai untuk menguji dan menyempurnakan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis *triple helix* dan *pentagonal assets*.

Dengan demikian, pemilihan kawasan Mojo bukan hanya karena faktor kerentanan sosial-ekonomi, tetapi juga karena potensi kolaborasi multi-pihak. Observasi dilakukan dalam dua tahap, pertama adalah diskusi terbatas (FGD) dengan pemerintah daerah setempat (Lurah, Ketua RW) dan lembaga swadaya masyarakat serta tokoh masyarakat kawasan Mojo. Kegiatan ini dilakukan dua kali pada tahun 2023, dan tujuannya adalah mengetahui peran masing-masing institusi dan jenis kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tahap kedua adalah wawancara langsung kepada masyarakat RW01 (22 KK) dengan menyebarkan kuesioner, tujuannya adalah mengetahui kegiatan dan partisipasi serta pendapatan masyarakat setelah adanya program tata ulang fisik dan lingkungan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan diskusi terbatas, didapatkan hasil bahwa di Kelurahan Mojo, terdapat beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM-NGO) yang berfungsi sebagai mediator untuk membangun kebersamaan warga, hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan masyarakat yang dilakukan secara teratur, seperti pengajian, kerja bakti / gotong royong satu bulan sekali, dan penyelenggaraan musyawarah warga. Ditambah lagi, juga terdapat komunitas wadah kelompok penghuni di area tanggul sungai Bengawan Solo atau disebut Mepet Tanggul (METAL). Kelompok ini merupakan kelompok warga non formal yang tangguh, sanggup hidup dan melangsungkan kehidupannya ditengah segala keterbatasan. Disamping itu, terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang secara formal berfungsi sebagai fasilitator untuk memberikan hibah pendanaan

kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang alokasinya bersumber dari anggaran Pemerintah Kota Surakarta.

Dalam kegiatan penataan ulang di kelurahan Mojo melalui program KOTAKU, juga terdapat strategi mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di level kelurahan, berbentuk pengembangan kelembagaan dan kegiatan usaha Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan akses pembiayaan. Akan tetapi, program ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, disebabkan keterbatasan anggaran dan masih menitik beratkan pada tata ulang fisik kawasan.

Assets	Livelihood Asset Parameters	Asset Condition	Score
Human Assets	Tingkat Pendidikan 12 thn	29.73%	3
	Keterampilan Khusus	40.82%	4,1
	Average		3,6
Natural Assets	Kepemilikan Lahan Hijau	61.22%	6,1
	Average		6,1
Financial Assets	Pendapatan UMK Per Bulan	42.43%	4,2
	Pernah Dapat Bantuan Dana	36.73%	3,7
	Average		4,4
Social Assets	Mengikuti NGO	85.71%	8,6
	Informasi Antar Masyarakat	85%	8,5
	Konflik Sosial Tidak Ada	93.88%	9,4
	Average		8,8
Physical Assets	Kepemilikan Tempat Tinggal	100%	10
	Kondisi Fisik Permanen	100%	10
	Luas Area Standar	14.29%	1,4
	Akses Air Bersih	100%	10
	Akses Sanitasi	100%	10
	Average		8,28

3.1. Keberlanjutan Kehidupan Masyarakat

Dari data sekunder dan hasil observasi setelah tata ulang fisik, didapatkan bentuk radar pentagonal aset seperti terlihat pada [Gambar 3](#) *Pentagonal Assets* di Kawasan Mojo. Dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa indeks modal sosial 8.8 dan modal fisik 8.6 adalah paling besar dibandingkan dengan indeks modal lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat memilih komunikasi sosial dan fisik untuk kehidupan keberlanjutannya. Indeks modal manusia dan modal finansial yang rendah lebih banyak disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, sehingga masyarakat lebih banyak mengandalkan komunikasi sosial.

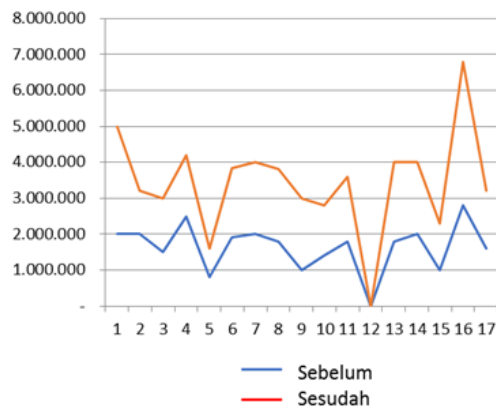


Gambar 3. *Pentagonal Assets* di Kawasan Mojo

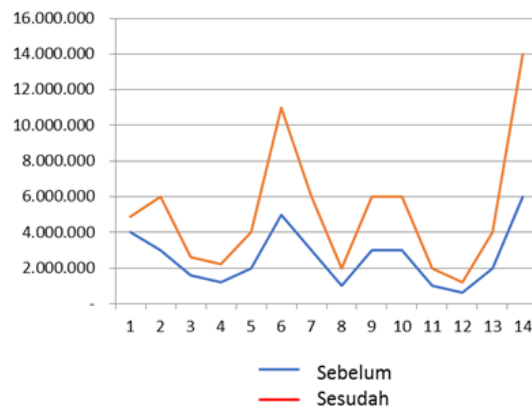
3.2. Pendapatan Masyarakat

Dari hasil survey kuesioner dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait dan 22 responden di Rukun Warga 1 Mojo, didapatkan bahwa eksisting pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah penataan kawasan, seperti terlihat pada [Gambar 4](#) *Pendapatan Komunitas*. Dalam gambar ini dapat dijelaskan bahwa pada [Gambar 4a](#) merupakan pendapatan masyarakat sebagai buruh dan pekerja serabutan yang secara garis besar dibawah 5 juta,

sedangkan pada [Gambar 4b](#) adalah pendapatan masyarakat sebagai wirausaha yang diantaranya berbentuk kerajinan, kuliner yang dapat mencapai lebih dari 5 juta. Dapat dikatakan bahwa sebelum dan sesudah perbaikan kawasan, penghasilan masyarakat tetap stabil dan ada kecenderungan meningkat walaupun melalui masa sulit di era pandemi covid 19 pada tahun 2019-2021. Dari gambar ini dapat dijelaskan juga bahwa pendapatan sebagai pengusaha lebih besar dibandingkan dengan sebagai pekerja/buruh.



a. Pendapatan Pekerja/Buruh



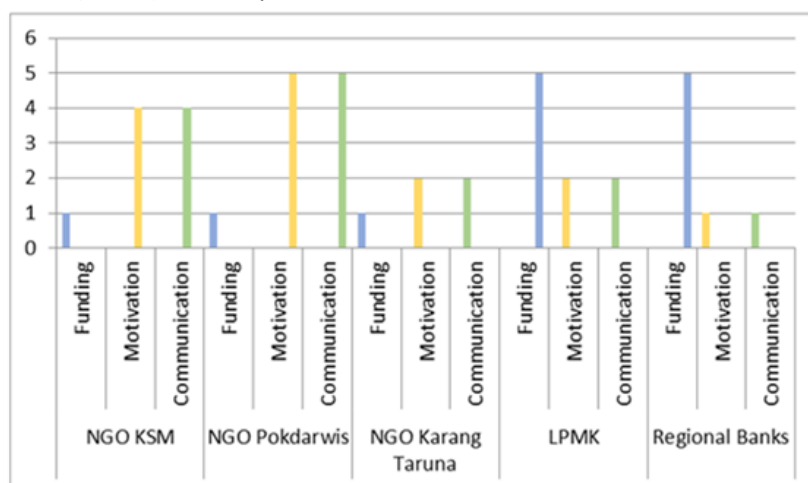
b. Pendapatan Wirausaha

Gambar 4. Pendapat Masyarakat

3.3. Peran Intermediator sebagai Elemen Modal Sosial

Dari hasil wawancara dan diskusi terbatas, khususnya dalam peningkatan pendapatan masyarakat, terdapat dukungan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM-NGO) yang sangat berperan sebagai intermediator, diantaranya yaitu kelompok swadaya masyarakat (KSM), kelompok sadar wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, dan institusi formal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta perbankan

setempat (Bank Jateng). Kemudian, setelah dilakukan pembobotan dengan skala likert 1-5, maka seperti terlihat pada Gambar 5, yang merupakan skala masing-masing institusi pendukung sebagai intermediator NGO adalah 4-5 dalam hal motivasi dan komunikasi, dan LPMK dan perbankan setempat dengan skala 5 dalam hal pendanaan. Dapat dikatakan bahwa NGO berperan sebagai motivator dan komunikator, dan LPMK serta perbankan berperan sebagai pendukung pendanaannya.



Gambar 5. Indeks Dukungan Lembaga Independen

Adapun NGO ini sangat aktif dalam mengajak masyarakat untuk selalu komunikatif dan menggagas ide tentang pengembangan kawasan yang berdampak kenaikan pendapatan masyarakat. NGO ini dikelola oleh para tokoh panutan

masyarakat setempat, yang ditunjuk oleh masyarakat dalam suatu pemilihan. Masyarakat lebih percaya dan banyak mengandalkan peran dari NGO disebabkan oleh pengaruh dan perannya serta rekam jejak dalam mendapatkan hak kepemilikan

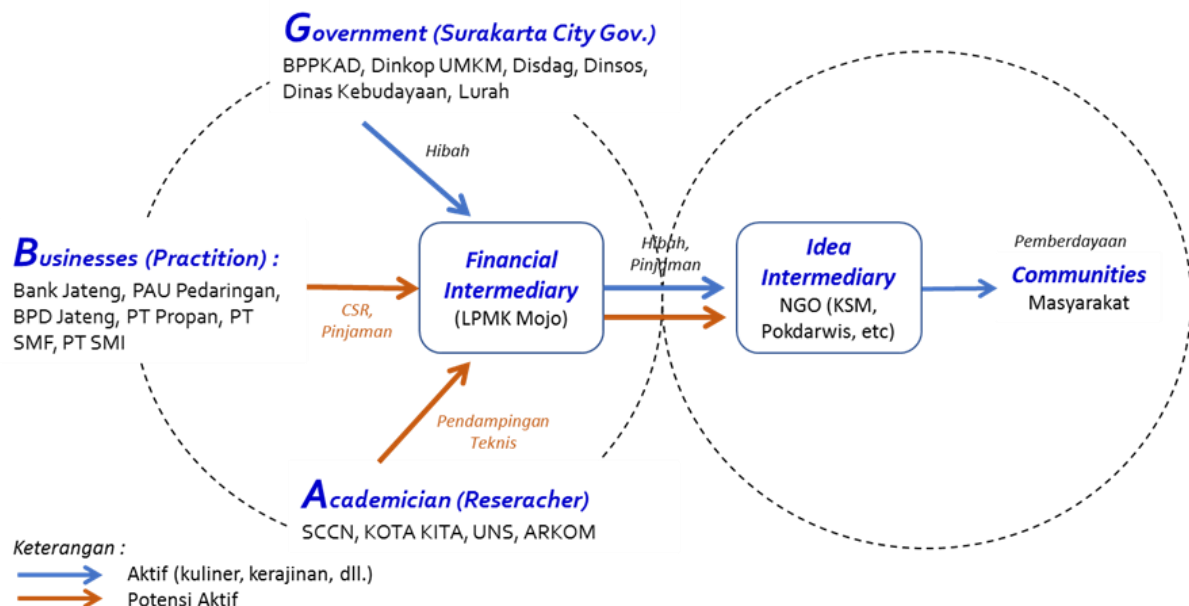
atas tanah dalam program tata ulang fisik sebelumnya. Khususnya Pokdarwis, sampai dengan saat ini masih aktif menggagas ide untuk menjadikan kawasan Mojo sebagai kawasan pariwisata dengan berbasis budaya lokal, yang sudah tentu diharapkan dampaknya adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sudah melakukan promosi dan pengenalan melalui media sosial diantaranya *you tube*.

LPMK sebagai institusi formal perpanjangan pemerintah kota, sampai dengan saat ini juga sudah memberikan pendanaan hibah kepada masyarakat yang terkait dengan peningkatan usaha, akan tetapi jumlah dan kapasitasnya masih sedikit. Kemudian

terdapat juga perbankan lokal (Bank Jateng) yang sudah memberikan pendanaan dalam bentuk pinjaman usaha mikro kecil, tetapi masih dalam jumlah nasabah terbatas.

3.4. Pola Penerapan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam diskusi terbatas terhadap *stakeholder* terkait dan wawancara terhadap masyarakat terdampak, didapatkan bahwa pola pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam kerangka *triple helix ABG*, seperti terlihat pada Gambar 6 Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Mojo, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 6. Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Mojo

- Government* adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Surakarta diantaranya adalah Dinas UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan. Sedangkan *Business* terdiri diantaranya Bank Jateng dan perusahaan swasta setempat (PT. SMF dll), sedangkan *Academician* terdiri dari peneliti dari universitas setempat dan konsultan swasta. Intermediator pendanaan adalah LPMK, sedangkan intermeditor ide gagasan adalah NGO.
- Dalam hal pendanaan hibah dari Pemerintah Kota Surakarta, seperti terlihat dengan garis

panah biru, skemanya telah disalurkan melalui LPMK sebagai institusi formal, yang kemudian disalurkan ke NGO sebagai pengusul proposal kegiatan masyarakat. Hal ini sudah berlangsung sejak lama, dan beberapa kegiatan yang sudah terlaksana adalah : bazar, bursa kerja, pelatihan, dll.

- Terdapat beberapa masyarakat yang langsung mendapatkan dana pinjaman dari perbankan setempat untuk pengembangan usahanya, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas. Dalam hal pendanaan ini, lembaga keuangan (Bank Jateng) setempat, belum menyusun program

pemberdayaan ekonomi masyarakat, akan tetapi terlihat dengan garis panah merah, bersedia untuk mendiskusikannya dan menyusun strategi dan prioritasnya dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR), atau pinjaman non kolateral melalui koordinasi dengan LPMK dan NGO.

- d) Walaupun beberapa program hibah dari hasil fasilitasi LPMK yaitu pendanaan atas ide kreatif dari NGO dan masyarakat sudah berlangsung, tetapi masih terdapat kendala dalam menyusun pertanggungjawaban keuangan. Sehingga, seperti terlihat dengan garis panah merah, diperlukan pendampingan teknis penyusunan khususnya oleh akademisi. Hal ini dimungkinkan dengan memperhatikan adanya kesediaan akademisi, dan juga adanya beberapa prospek potensial dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi lokal yang sudah tumbuh dan berkembang tetapi masih sebatas gagasan.

3.5. Pembahasan

- a. Kekuatan Model *Triple Helix* (TH): Model *Triple Helix* (TH) banyak mendapatkan apresiasi karena menekankan co-creation pengetahuan dan inovasi melalui interaksi dinamis antara universitas – industri - pemerintah. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana jejaring aktor dan institusi mendorong inovasi, baik di negara maju maupun negara berkembang. Namun, sebagian besar studi TH masih berfokus pada kebijakan dan ekosistem inovasi pada skala kota atau negara. Dalam konteks komunitas rentan, seperti kawasan kumuh, kajian masih terbatas sehingga isu kesetaraan dan inklusi sering terabaikan. Selain itu, peran lembaga intermediasi (misalnya NGO atau LPMK) sebagai penghubung (*bridging/linking*) sering kali tidak terkuantifikasi, meskipun peran mereka krusial dalam memediasi akses terhadap program, informasi, dan pembiayaan (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Penelitian ini berkontribusi dengan mengimplementasikan kerangka TH pada tingkat kelurahan serta mengeksplorasi peran intermediasi komunitas dalam menjembatani kesenjangan koordinasi antara aktor akademisi, dunia usaha, dan pemerintah. Topik ini relatif masih jarang dibahas secara mendalam dalam literatur mengenai TH.
- b. *Pentagonal Assets* dan Penghidupan: Kerangka *Pentagonal Assets* menekankan pentingnya lima modal (manusia, sosial, fisik, finansial, dan alam) dalam memahami kerentanan yang berimplikasi pada pendapatan rumah tangga. Kerangka ini terbukti efektif untuk pemetaan cepat sekaligus memfasilitasi komunikasi lintas pemangku kepentingan. Integrasi radar aset dengan analisis modal sosial memperkaya interpretasi, khususnya dalam mengidentifikasi apakah ikatan sosial yang kuat di Mojo disertai dengan kapasitas *bridging* dan *linking* ke institusi formal, seperti pemerintah atau perbankan (misalnya LPMK atau Bank Jateng), yang relevan dalam meningkatkan akses pendanaan (Damayanti et al., 2022).
- c. Evaluasi Program KOTAKU: Berbagai evaluasi dan dokumen resmi menunjukkan bahwa program KOTAKU efektif dalam meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar di lokasi sasaran melalui desain yang berorientasi pada *community-driven development* (CDD). Hal ini tercermin pada tingginya indeks modal fisik di banyak kawasan pasca-penataan (The World Bank, 2016). Namun, implementasi di lapangan sering lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, sementara aspek penghidupan dan pembiayaan usaha cenderung diperlakukan sebagai isu sekunder. Akibatnya, dampak langsung terhadap pendapatan rumah tangga relatif lemah dan sulit diukur. Studi kasus lebih lanjut mengindikasikan bahwa capaian program dipengaruhi oleh kekuatan jejaring aktor dan kapasitas institusional di daerah. Ketika koordinasi lemah, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat berkurang (Zuhdi, Rusli, Buchari, Sugandi, & Suryana, 2024).
- d. Pola Modal Fisik dan Implikasi: Temuan penelitian ini menunjukkan modal fisik dan sosial relatif tinggi, sedangkan modal finansial dan manusia cenderung rendah. Pola tersebut konsisten dengan tren umum “fisik dahulu, nafkah kemudian” dalam program penataan kawasan. Nilai tambah penelitian ini terletak

pada pengujian apakah keberadaan intermediasor lokal mampu menjembatani pencapaian program fisik menuju peningkatan akses pada modal finansial maupun manusia, yang pada akhirnya dapat terukur dalam perubahan pendapatan masyarakat (Hernberg & Hyysalo, 2024; Li, Huang, Liu, Shrestha, & Fu, 2022).

4. KESIMPULAN

Di kawasan kumuh Mojo, setelah terlaksananya program tata ulang fisik dan lingkungan, dilakukan observasi dan wawancara terhadap pemangku kepentingan terkait, dan khususnya terhadap peran modal sosial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Adanya perubahan dalam fokus kehidupan berkelanjutan, yaitu indeks modal fisik yang tinggi disebabkan oleh program tata ulang fisik dan lingkungan yang cukup berhasil dan memuaskan masyarakat, dan indeks modal sosial yang juga tinggi banyak disebabkan oleh kepercayaan atas rekam jejak tokoh sebagai intermediasor.

A. Walaupun belum banyak terdapat program khusus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi secara mandiri masyarakat telah melakukannya dengan memanfaatkan pendanaan seadanya, sehingga berdampak pendapatan masyarakat yang cukup stabil. Hal ini banyak disebabkan oleh peran intermediasor sebagai elemen dalam modal sosial yang kuat, khususnya dalam memfasilitasi ide gagasan masyarakat dan memfasilitasi pendanaannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa modal sosial menjadi perekat dalam kerangka kolaborasi *triple helix*.

B. Pola penerapan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh modal sosial, sudah terbentuk secara independen, hal ini diperkuat dengan peran dan fungsi intermediasor (NGO dan LPMK) dalam memfasilitasinya.

Berdasarkan kesimpulan ini, maka peneliti memberikan saran dalam rangka pemberdayaan

ekonomi masyarakat di kawasan kumuh Mojo sebagai berikut:

- a. Penguatan Peran Intermediasor Lokal : Organisasi non-pemerintah (NGO) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) perlu diformalisasi dalam kerangka *triple helix* sebagai jembatan resmi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor bisnis. Pemerintah kota disarankan untuk merancang skema pendampingan kelembagaan yang mencakup pelatihan akuntabilitas, penyusunan proposal, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Langkah ini penting untuk meningkatkan kredibilitas dan legitimasi NGO maupun LPMK.
- b. Integrasi Pemberdayaan Ekonomi dengan Program Tata Ulang Fisik : Program tata ulang fisik (KOTAKU), tidak seharusnya berhenti pada aspek infrastruktur semata, tetapi wajib dilengkapi dengan komponen penghidupan (*livelihood*). Pemerintah kota dapat merancang paket terpadu berupa tata ulang fisik yang diiringi pelatihan keterampilan, akses kredit mikro, serta dukungan pemasaran.

5. PERNYATAAN RESMI

Penelitian ini terselenggara atas bantuan dana hibah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (RKAT PTNBH) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 melalui skema Penelitian Hibah Group Riset, dengan nomor perjanjian 228/UN27.22/PT.01.03/2023. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyelenggara dan pimpinan Universitas Sebelas Maret.

6. DAFTAR PUSTAKA

Andriana, L., & Manaf, A. (2017). Relevansi Aspek Kemiskinan Dan Fisik Lingkungan Kumuh Pada Penentuan Lokasi Penerima Program Kotaku (Studi Kasus Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Pengembangan Kota*, 5(2), 131-139. doi:<https://doi.org/10.14710/jpk.5.2.131-139>

- Ardhiawan, A. B., Handayani, K. N., & Musyawaroh, M. (2025). *Evaluation of Slum Upgraded Housing for Low-Income Community in Kampung Mojo, Surakarta*. Paper presented at the The 2nd International Conference on Environmental Management: Leveraging Digitalization and Technological Advancements for a Greener Future (ICEM 2024).
- Arisandi, Muthalib, A. A., Gamsir, Saenong, Z., & Balaka, M. Y. (2023). Economic Empowerment and Collaboration of Urban Slum Arrangement: Review the Kotaku Program in Kendari City. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 8(6), 28. doi:<https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i6.2338>
- Bagdja, R. S. A., & Nohong, M. (2023). *Period of Pentahelix Collaborative Participation*. Paper presented at the Proceedings of the 7th International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME-7 2022).
- BPS. (2019). Statistical Yearbook of Indonesia 2019 (S. of S. C. and P. Publication (ed.); 1st ed.). from BPS-Statistics Indonesia file:///E:/UNS/RG 1/2023 MOJO/Pemberdayaan Ekonomi Mas Kumuh/Referensi/statistik-indonesia-2019.pdf
- Byers, T. H., Dorf, R. C., & Nelson, A. J. (2001). *Technology ventures from idea to enterprise*. In McGraw-Hill (3rd ed., Vol. 3, Issue 6). New York: McGraw-Hill Education.
- Damayanti, A., Yanti, M., & Hapsari, D. (2022). Kontribusi Modal Sosial dalam Kesuksesan Revitalisasi Permukiman Kumuh Kota Palembang. *geoedusains: Jurnal Pendidikan Geografi*, 3(2), 102-115. doi:<https://doi.org/10.30872/geoedusains.v3i2.1659>
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations. *Research Policy*, 29(2), 109-123. doi:[https://doi.org/10.1016/S0049-0078\(00\)00048-7](https://doi.org/10.1016/S0049-0078(00)00048-7)
- Fachlevi, D. S., Fauziyah, E., & Sunyigono, A. K. (2022). Strategi Nafkah Berkelanjutan Rumah Tangga Peternak Sapi Sonok di Desa Batu Bintang Kecamatan Batu Mar-Mar Kabupaten Pamekasan. *AGRISCIENCE*, 2(3), 805-818. doi:<https://doi.org/10.21107/agriscience.v2i3.14759>
- Fadhila, D., & Astutik, D. (2023). Penguatan modal sosial dalam program pemberdayaan masyarakat kampung sayur organik dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 7(1), 102-111.
- Fadli, F. (2015). Modal Sosial Dan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Agrium*, 12(1). doi:<https://doi.org/10.29103/agrium.v12i1.383>
- Fakhri, H., Astuti, W., & Andini, I. (2023). Penataan Permukiman Kumuh di Kawasan HP 00001 Kelurahan Mojo dan Dampaknya terhadap Kualitas Hidup Masyarakat. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 5(1), 64-76. doi:<https://doi.org/10.20961/desa-kota.v5i1.67515.64-76>
- Handoyo, E. (2013). Kontribusi Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pascarelokasi. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(2), 252-266. doi:<https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i2.2743>
- Hernberg, H., & Hyysalo, S. (2024). Modes of Intermediation: How Intermediaries Engage in Advancing Local Bottom-Up Experimentation. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 51, 100849. doi:<https://doi.org/10.1016/j.eist.2024.100849>
- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 8(3), 250-265.

doi:<http://dx.doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>

- Juniarsih, N. (2018). Modal Sosial Sebagai Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 7(2), 262–273.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 2019*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kholis, A., Nasirwan, Lubis, S., & Anggriyani. (2021). *Model Triple Helix Dalam Kegiatan Corporate Social Responsibility (1st ed.)*. Fakultas Ekonomi UNIMED: Economic & Business Publishing.
- Li, K., Huang, R., Liu, G., Shrestha, A., & Fu, X. (2022). Social Capital in Neighbourhood Renewal: A Holistic and State of the Art Literature Review. *Land*, 11(8), 1202.
- Muhammad, S., Islamy, I., & Sukoharsono, E. G. (2014). *Pemberdayaan Heptagon Akses Rumah Tangga Masyarakat Miskin: Penguatan Ekonomi Rumah Tangga Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan*. Malang, Indonesia: Universitas Brawijaya Press.
- Muta'ali, L., & Nugroho, A. R. (2016). *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro.
- Rigon, A. (2022). Diversity, Justice and Slum Upgrading: An Intersectional Approach to Urban Development. *Habitat International*, 130, 102691. doi:<https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2022.102691>
- Salinan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 640.05/48.3 Tahun 2021.
- Satrio, M. I., & Sukmawati, A. M. a. (2021). Kebertahanan Masyarakat pada Permukiman Kumuh Berdasarkan Aspek Sosial Ekonomi di Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 3(1), 36-48. doi:<https://doi.org/10.20961/desa-kota.v3i1.43694.36-48>
- Setyaningrum, A., & Nugroho, A. S. (2022). Strategi Penghidupan Berkelanjutan pada Komunitas Pengolah Ikan di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Kalurahan Poncosari, Kepanewon Srandakan, Bantul). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 17(1), 115-123. doi:<http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v17i1.10737>
- Soma, H., Sukhwani, V., & Shaw, R. (2022). An Approach to Determining The Linkage Between Livelihood Assets and The Housing Conditions in Urban Slums of Dhaka. *Journal of Urban Management*, 11(1), 23-36. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jum.2021.08.006>
- Suryanggono, B. (2013). Pengaruh Modal Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia: Analisis Data Susenas 2009. *Kinerja*, 17(2), 145–157. doi:<https://doi.org/10.24002/kinerja.v17i2.376>
- The World Bank. (2016). *National Slum Upgrading Project (NSUP)*. Retrieved from <https://monitoring.skp-ham.org/wp-content/uploads/2020/03/Proposed-Loan-KOTAKU-June-9-2016.pdf>
- Troot, P. (2016). *Innovation Management and New Product Development*. Retrieved from <https://www.amazon.com/Innovation-Management-New-Product-Development/dp/1292133422?asin=1292133422&revisionId=&format=4&depth=1>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Witjaksono, M. (2014). Siparti 3-S, triple helix, and social capital in strengthening local competitive industries in Indonesia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(3), 21-33.
- Wu, K., Liu, Y., Xu, Y., & Sun, H. (2023). It Pays to Have Guanxi: How Social Capital Affects Household Income in China. *International Studies of Economics*, 18(3), 370-392. doi:<https://doi.org/10.1002/ise3.43>

- Wuysang, R. (2014). Modal Sosial Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Suatu Studi Dalam Pengembangan Usaha Kelompok Tani di Desa Tincep Kecamatan Sonder. *Acta Diurna Komunikasi*, 3(3).
- Yunus, S. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*: Bandar Publishing.
- Zubaidah, S., Rusli, B., Djaja Saefullah, A., & Widianingsih, I. (2023). An Overview of Slum Upgrading Programs in Developing Countries: Case study in Indonesia. *Cogent Arts & Humanities*, 10(2), 2264021. doi:10.1080/23311983.2023.2264021
- Zuhdi, S., Rusli, B., Buchari, R. A., Sugandi, Y. S., & Suryana, D. (2024). Policy Network in the Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Program in Pekanbaru City, Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 19(8). doi:10.18280/ijstdp.190830